

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

Periode 2013-2019

Bagus Haryo Kusumo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: haryokusumo@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia. Provinsi Jawa Tengah, salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa, hanya berada satu tingkat dibawah DIY Yogyakarta. Pada periode tahun 2013-2019 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah terus menurun, tetapi hal ini masih menempatkan Jawa Tengah di posisi kedua wilayah termiskin di Pulau Jawa. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pendidikan, serta upah minimum kabupaten. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pendidikan, dan upah minimum kabupaten terhadap kemiskinan di Jawa Tengah yang diharapkan nantinya dapat memberikan bantuan terhadap pemerintah dalam menentukan kebijakan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan tahun periode 2013 – 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan, pengangguran, dan upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

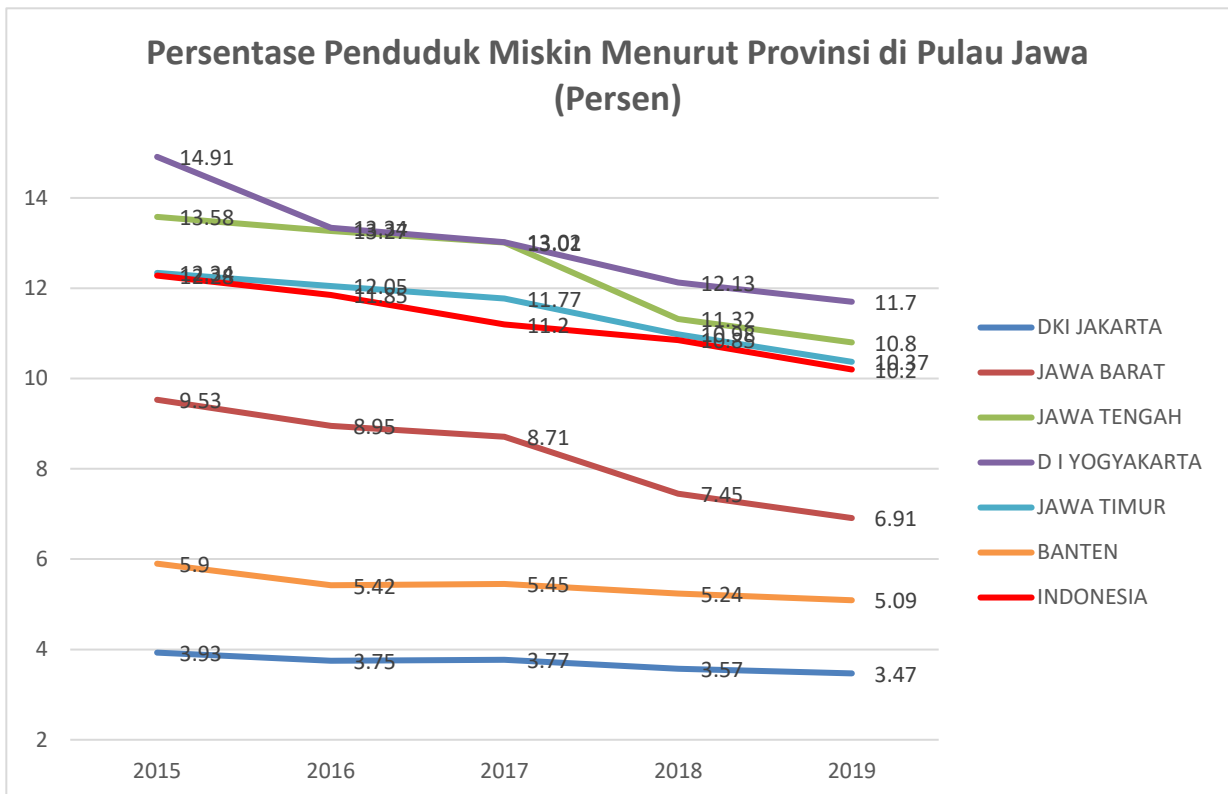
Kata kunci: Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendidikan, upah minimum, Provinsi Jawa Tengah

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang terbesar di dunia, dimana kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang tengah dihadapi Indonesia. Setiap negara selalu mencari penyelesaian masalah kemiskinan dan menciptakan beberapa program yang ada di negaranya, begitu pula dengan Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Jika tidak mampunya pendapatan serta aset untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat ditempuh merupakan salah satu penyebab dari kemiskinan. *Poverty* sendiri dalam pemaknaannya dipahami sebagai situasi kekurangan uang dan barang untuk menjamin keberlangsungan hidup (World Bank, 2020).

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia yang sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Badan Pusat Statistik (2021:14) kesejahteraan umum adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, serta sosial penduduk suatu negara agar mampu hidup layak dan dapat mengembangkan diri, agar bisa menjalankan fungsi sosial dan ekonominya. Dalam hal ini, tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia menggambarkan kesejahteraan umum di Indonesia. Setiap tahunnya pemerintah melakukan berbagai upaya kegiatan pembangunan nasional untuk dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satu caranya adalah dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan ke daerah - daerah, khususnya pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah sehingga pemerintah daerah sangat berperan penting dalam menanggulangi kemiskinan.

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistika (diolah), 2021

Berdasarkan gambar diatas jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan 6 provinsi di Pulau Jawa masih tidak merata, dan sebagian besar tingkat kemiskinan diatas 10%, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur, sedangkan DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Jawa Barat sudah berada di bawah 10%. Jika dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin secara nasional dari tahun 2015 – 2019, Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada urutan pertama, Provinsi Jawa Tengah

berada pada urutan kedua, kemudian Provinsi Jawa Timur berada di urutan ketiga. Angka ini masih diatas tingkat kemiskinan nasional yaitu sebesar 11,28%.

Selain menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah, pertumbuhan daerah juga merupakan syarat yang cukup penting dalam pengentasan kemiskinan di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi ini sendiri tercermin dari peningkatan PDRB setiap tahunnya. Sejak tahun 2016 sampai 2019 PDRB Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Laju Pertumbuhan PDRB dari Jawa Tengah sendiri sudah mampu melebihi tingkat laju pertumbuhan PDB Nasional. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah masih merupakan yang paling rendah.

Selain dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan melalui PDRB, kemiskinan juga dipengaruhi oleh pengangguran. Lewis mengatakan bahwa masalah kelebihan tenaga kerja adalah tujuan dari dikemukakannya teori mengenai proses pembangunan yang khusus diperuntukan bagi negara yang mengalami masalah demikian, anggapan Lewis bahwa di Negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih, akan tetapi justru sebaliknya menghadapi masalah kekurangan modal dan keluasan tanah yang belum digunakan sangat terbatas (Sukirno, 2006:267). Pengangguran tidak luput dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, standar hidup yang rendah diwujudkan secara kualitatif maupun kuantitatif didalam wujud tingkat pendapatan yang sangat rendah, tempat tinggal yang tidak layak, kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah, atau mungkin tidak ada sama sekali, angka kematian bayi yang tinggi, usia harapan hidup yang cukup pendek dan peluang dalam mendapatkan pekerjaan yang rendah.

Salah satu faktor lain yang juga mempengaruhi terjadinya kemiskinan adalah tingkat kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kualitas sumber daya manusia ini salah satunya adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan pendidikan. Apabila tingkat pendidikan yang rendah, maka akan semakin rendah juga produktivitas kerja dari masyarakat, apabila produktivitas masyarakat rendah, akan mengakibatkan rendahnya pendapatan, dengan semakin rendahnya pendapatan, maka akan mengurangi kemampuan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhannya, yang berarti akan menambah kemiskinan. Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat pendidikan dari suatu wilayah adalah dengan mengetahui Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dengan mengetahui tingkat RLS, maka akan diketahui seberapa jauh masyarakat di wilayah tersebut mampu untuk menempuh pendidikan, yang mana nantinya akan berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusia wilayah tersebut.

Selain itu, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi kemiskinan adalah pengupahan, adanya upah yang rendah yang diterima oleh masyarakat akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat suatu daerah sehingga pendapatan tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upah yang rendah dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah secara otomatis akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat.

Kualitas sumber daya manusia sering dikaitkan oleh ketrampilan yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat. Adanya pelatihan serta pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya

manusia yang nantinya kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi penentuan besar pendapatan yang diterima masyarakat, apabila faktor ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka masyarakat miskin akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan secara turun-temurun.

Dengan berdasarkan dari kondisi tersebut maka kajian yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sangatlah penting. Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat mengidentifikasi faktor kemiskinan dan dapat merumuskan kebijakan yang nanti dapat membantu pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Arsyad (2010:299) menjelaskan menurut para ahli, kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam, maka kemiskinan juga memiliki banyak aspek. Jika dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang artinya miskin dalam hal aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta ketrampilan; untuk aspek sekunder yang meliputi miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Bentuk-bentuk kemiskinan tersebut tergambarkan lewat peristiwa kekurangan gizi, air, perumahan yang kurang sehat, perawatan kesehatan yang kurang, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Kemiskinan adalah suatu kondisi yang absolut atau relatif di suatu wilayah di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan sesuai tata nilai ataupun norma yang berlaku. apabila dipandang dari aspek ekonomi, kemiskinan merujuk pada celah antara lemahnya daya beli (*purchasing power*) dan keinginan dalam memenuhi kebutuhan dasar (Nugroho dan Dahuri, 2012:182).

Kemiskinan memiliki pemaknaan yang luas serta tidaklah mudah dalam mengukurnya. Pada umumnya ukuran kemiskinan dibagi menjadi dua. Yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. kemiskinan absolut umumnya dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan, kebutuhan yang dimaksud hanya dibataskan pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap kebutuhan sandang, pangan, papan untuk keberlangsungan hidup. (Todaro & Smith, 2015:232). Sementara Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum terjangkau oleh seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Konsep ini menjelaskan bahwa, perubahan garis kemiskinan akan terjadi apabila tingkat hidup masyarakatnya berubah (Todaro dan Smith, 2015:232).

Kuncoro (2004:120) mengemukakan pendapatnya mengenai penyebab-penyebab terjadinya kemiskinan di suatu wilayah diantaranya; ketidak samaan pola sumberdaya yang mengakibatkan distribusi pendapatan yang timpang, perbedaan kualitas SDM, dan perbedaan akses dalam modal. Kemiskinan disamping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat, ternyata kemiskinan juga berkaitan dengan kepemilikan atau faktor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri, juga berkaitan dengan kebijakan pembangunan

yang dilaksanakan daerah masing-masing. Dengan kata lain, kemiskinan selain ditimbulkan oleh hal yang bersifat alamiah atau kultural, kemiskinan juga disebabkan oleh minimnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, sehingga para sebagian pakar menganggap bahwa fenomena kemiskinan merupakan masalah struktural. Maka dari itu muncul istilah kemiskinan struktural, yang dimana mereka yang menderita karena struktur sosial masyarakat tersebut, sehingga mereka tidak dapat lagi menikmati sumber-sumber pendapatan yang tersedia bagi mereka (Sumardjan (1980) dalam Arsyad, 2010:301).

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dalam penggunaan pendekatan ini maka kemiskinan dilihat sebagai ketidak mampuan dari segi ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan merupakan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Maka dari itu, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan yang berada dibawah garis kemiskinan.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya ada pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Boediono, 2009:1).

Menurut Sukirno (2006:268-269) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi didalam masyarakat bertambah. Meningkatnya kemampuan ini didasari oleh bertambahnya faktor-faktor produksi baik dalam hal jumlah dan kualitasnya. Meningkatnya investasi akan sejalan dengan berkembangnya barang modal dan teknologi yang digunakan.

Cara mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu negara maka dibutuhkan untuk membandingkan perekonomian daerah terkait dari suatu periode ke periode lainnya. Dalam membandingkannya perlu diketahui bahwa perubahan nilai pendapatan nasional terjadi dari tahun ke tahun disebabkan oleh dua faktor yaitu perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan-perubahan harga produksi. Adanya pengaruh dari faktor yang pertama tersebut disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi yang lebih baik dan yang kedua tersebut disebabkan oleh penilaian pendapatan nasional menurut harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

Terdapat beberapa teori mengenai pertumbuhan ekonomi yang terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama merupakan teori ekonomi klasik. Pokok dari teori ekonomi klasik ini adalah bahwa sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi dan membawa ekonomi kepada kondisi *full employment* dan bisa menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner. Posisi stasioner dalam pertumbuhan ekonomi ini akan dapat tercapai jika sumber daya alam yang ada telah mampu dimanfaatkan secara keseluruhan. Adam Smith berpendapat bahwa dalam suatu perekonomian, pemerintah tidak perlu ikut campur di dalamnya, yang harus dilakukan pemerintah adalah

memberi kebebasan kepada tiap orang untuk berusaha dan memberi dorongan berupa fasilitas supaya para pelaku usaha dapat melakukan aktifitas perekonomian dengan maksimal.

Selain itu terdapat teori pertumbuhan neo-klasik, Teori pertumbuhan neo-klasik mengacu pada pertumbuhan perekonomian negara maju seperti Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Jepang. Kuznets dalam Jhingan (2007:87-93) mengemukakan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi neo-klasik. Yang diantaranya; (1) terdapat laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita, (2) peningkatan produktivitas, (3) laju perubahan struktural yang tinggi, (4) urbanisasi, (5) ekspansi negara maju, (6) arus barang, modal, dan orang antarwilayah. Keenam ciri tersebut adalah berhubungan sebab-akibat, yang berarti saling keberadaan ciri tersebut pada suatu daerah akan berkaitan satu sama lain. Dengan rasio yang stabil antara tenaga kerja terhadap penduduk total, laju kenaikan produk perkapita menjadi tinggi. Begitu juga sebaliknya.

Sukirno (2006:268) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi; (1) tanah dan kekayaan alam, (2) jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja, (3) barang-barang modal dan tingkat teknologi, dan (4) sistem sosial dan sikap masyarakat. Lain halnya dengan pendapat Jhingan (2007:67), menurutnya proses pertumbuhan ekonomi memang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi tanpa faktor nonekonomi yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan yang kuat, karena pada tahapan awal proses pembangunan, tingkatan kemiskinan cenderung bertambah dan mendekati dengan tahap akhir pembangunan, jumlah orang miskin mengalami penurunan (Tambunan, 2011:66-67). Tetapi pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti dengan penambahan kesempatan kerja maka akan dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam pembagian daripada penambahan pendapatan tersebut. Yang nantinya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang juga meningkatkan kemiskinan. (Tambunan, 2011:67)

Kacem (2012:3) mengutarakan bahwa dalam menanggulangi kemiskinan perlu adanya kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang baik dan diikuti dengan berkurangnya ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat mengurangi kemiskinan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh efek pertumbuhan ekonomi yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak tertentu dan tidak secara menyeluruh. Efek pengentasan kemiskinan dari pertumbuhan ekonomi juga tidak akan terjadi apabila faktor-faktor lain yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan tidak mendukung.

Pengangguran

Sukirno (2006:329) membagi jenis pengangguran menjadi dua, yaitu; pengangguran berdasarkan penyebabnya, dan pengangguran berdasarkan cirinya. Jenis pengangguran terbagi menjadi empat kelompok: Pengangguran normal, siklikal, struktural, dan pengangguran teknologi. Lalu, pengangguran berdasarkan cirinya, juga

dibagi menjadi empat kelompok (Sukirno, 2006:330), yaitu; Pengangguran terbuka, tersembunyi, musiman dan setengah menganggur.

Ketika membicarakan tentang pengangguran, hal yang seringkali diperhatikan bukan tentang jumlah pengangguran, akan tetapi tentang tingkat pengangguran yang dinyatakan sebagai persentase dari angkatan kerja. Untuk mengukur keterjangkauan pekerja (kesempatan bekerja), maka digunakan rumus Tingkat Pengangguran Terbuka. Pengertian dari Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. (BPS, 2020:44)

Tingkat pengangguran terbuka memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok penganggur. Tingkat pengangguran kerja diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengukur tingkat pengangguran terbuka pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen.

Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Kemiskinan

Menurut Sukirno (2006:14) pengangguran adalah masalah yang sangat buruk efeknya kepada perekonomian dan masyarakat. Pengangguran yang tinggi mempunyai dampak buruk baik terhadap perekonomian, individu dan masyarakat, seperti tingginya jumlah pengangguran akan menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapai, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga timbul kemiskinan, kejahatan, dan masalah sosial lainnya

Meningkatnya angka pengangguran dapat memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian suatu negara, orang yang tidak bekerja menyebabkan seseorang tidak bisa menghasilkan barang dan jasa. Hal ini akan diikuti dengan turunnya pendapatan perkapita. Sehingga menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat yang menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang jasa. Kemudian hal ini akan mengakibatkan para investor tidak melakukan perluasan dalam mengembangkan usahanya, sehingga perekonomian turun. Semakin banyak pengangguran maka Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan akan menurun. Dengan demikian pendapatan perkapita yang rendah mengakibatkan tingkat kesejahteraan menurun dan meningkatnya kemiskinan.

Pendidikan

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terbesar dalam pembangunan sehingga perlu perhatian utama dari pemerintah. Peningkatan sumber daya manusia ini dapat diupayakan dengan meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 25 potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Depdiknas, 2003:1). Pendidikan dianggap memainkan peran utama untuk membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi agar tercipta

pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro & Smith, 2015:461). Dari beberapa definisi tentang pendidikan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya persuasif yang dilakukan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara menyeluruh dalam memasuki kehidupan dimasa yang akan datang.

Hubungan Pendidikan dengan Kemiskinan

Dalam Indeks Pembangunan Manusia terdapat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (longevity) dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Dapat dikatakan bahwa peningkatan pada sektor pendidikan akan mempengaruhi pendapatan perkapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

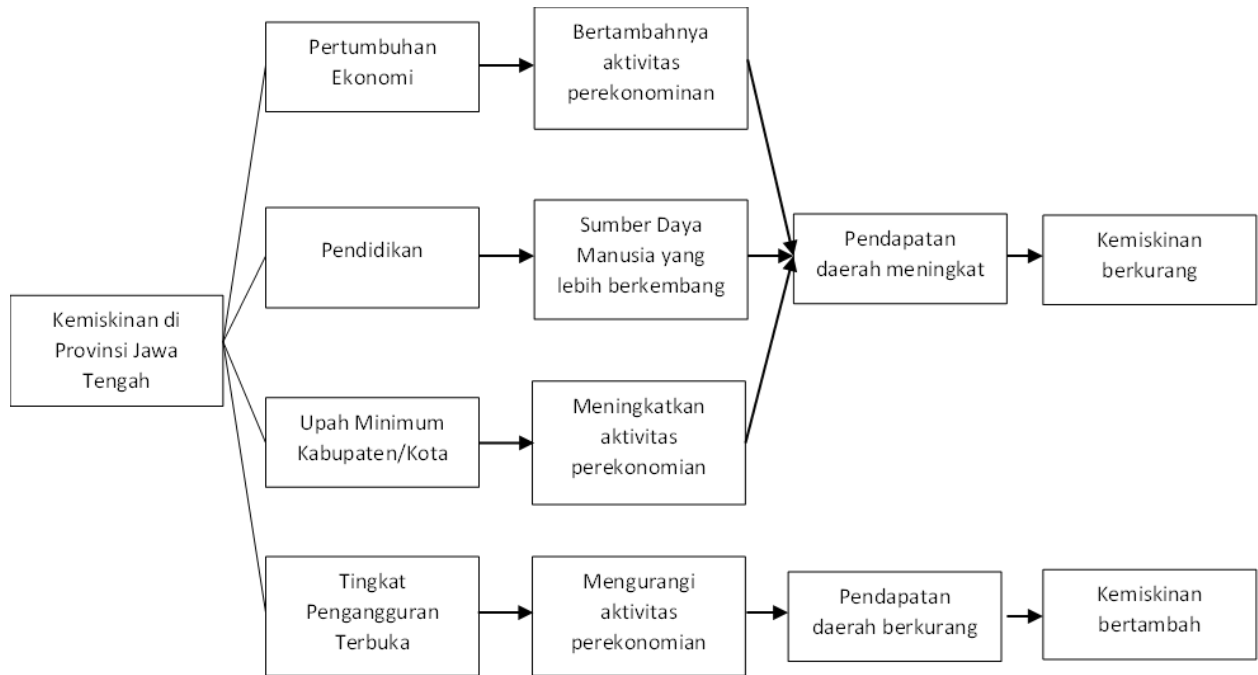
Upah Minimum

Upah minimum sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013 adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjaannya. Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan.

Hubungan Upah Minimum dengan Kemiskinan

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan peran pekerja atau buruh (Sirusa BPS, 2020).

Gambar 2. Kerangka Pikir



Sumber: Ilustrasi Penulis, 2021

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pendidikan dan upah minimum kabupaten (UMK) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. supaya dapat mewujudkan pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang lebih efektif. berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif ini berguna untuk mendeskripsikan suatu gejala sosial dengan melakukan penghitungan data untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah untuk nantinya dapat merumuskan strategi memberantas kemiskinan serta dapat mempercepat pembangunan dan pemerataan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk menganalisa pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pendidikan dan upah minimum kabupaten (UMK) terhadap kemiskinan dalam rangka mengatasi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota mulai dari tahun 2013 sampai 2019. dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2013 – 2019.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Menurut Suryabrata (2009:39) data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sedangkan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan studi literatur yaitu mencari data dari buku bacaan, penelitian sebelumnya, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan dari Badan Pusat Statistik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kemiskinan, laju pertumbuhan PDRB dalam Persen, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rata Lama Sekolah, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 sampai 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Penentuan Model

Model yang digunakan dalam analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi, dalam hal ini menyangkut studi tentang hubungan antara satu variabel yang disebut variabel tak bebas atau variabel yang dijelaskan dan satu atau lebih variabel lain yang disebut dengan variabel bebas atau variabel penjelas dengan tujuan untuk menaksir nilai rata-rata dari variabel tak bebas berdasarkan nilai-nilai variabel bebas yang ada (Gujarati dan Porter, 2012:68). Analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah menggunakan model regresi data panel.

Penelitian ini mengambil Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dengan satuan persen sebagai variabel dependen dan untuk variabel independen adalah Laju Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Adapun model regresi yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0_{it} + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + \mu_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Intersep

Y = Tingkat Penduduk Miskin (Persen)

X1 = Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)

X2 = Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)

X3 = Rata-Rata Lama Sekolah (Persen)

X4 = Upah Minimum Kabupaten/Kota (Persen)

μ_{it} = Variabel Error Di Luar Model

i = Banyaknya Observasi

t = Waktu

i x t = Data Panel

Dalam pemilihan model terbaik dalam tahapan regresi data panel, pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan uji untuk memilih metode mana yang terbaik antara ketiga metode tersebut antara lain adalah dengan melakukan Uji Chow, dan Uji Hausman. Uji Chow dilakukan untuk menguji antara metode common effect model dan fixed effect model, sedangkan Uji Hausman dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan menggunakan *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Dalam uji chow data diregresikan menggunakan *fixed effect model* apabila nilai *Prob. Square* nya lebih besar dari 0,05 maka model yang digunakan adalah *common effect* sementara apabila *Prob. Square* nya lebih kecil dari 0,05 maka yang digunakan adalah *fixed effect*. Lalu dilanjutkan dengan Uji Hausman untuk memilih apakah menggunakan *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Namun, Uji Hausman tidak perlu lagi dilakukan apabila hasil dari Uji Chow menunjukkan H0 diterima dan menyimpulkan untuk menggunakan *Common Effect Model*.

Analisis Hipotesa

1. Koefisien Determinasi, Koefisien determinasi (R-Squared) menunjukkan seberapa besar kekuatan model dengan melihat persentase variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen. Nilai R-Squared berkisar antara 0 dan 1, apabila nilai tersebut mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam variabel independen dan model dalam penelitian ini semakin kuat.
2. Uji Simultan (Uji F-Statistik), Uji F ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas alpha pada tingkat 5%. Jika nilai probabilitas kurang dari 5% maka model diterima dan terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen, dan begitu pula sebaliknya.
3. Uji Parsial (Uji T-Statistik), Uji t-statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk melihat secara parsial apakah variabel independen masing-masing memiliki pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas alpha pada tingkat 5%. Jika nilai probabilitas kurang dari 5% maka model diterima dan terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen, dan begitu pula sebaliknya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Jawa Tengah merupakan provinsi yang strategis secara geografi, astronomi maupun geologi. Secara geografi, Jawa Tengah diapit oleh tiga provinsi, laut dan samudera. Batas yang mengapit Jawa Tengah adalah Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Indonesia di sebelah selatan.

Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh wilayah; dan pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan.

Luas Jawa Tengah 32.544,12 km² atau lebih dari seperempat luas wilayah Pulau Jawa. Wilayah dataran terletak pada ketinggian 0 – 99 meter di atas permukaan laut (mdpl) seluas 53%. Wilayah lereng bukit yang landai 100 – 499 mdpl seluas 27,4%, dan wilayah pegunungan lereng bukit 500 – 999 mdpl seluas 14,7% dan wilayah pegunungan yang curam \geq 1000 mdpl seluas 4,6%. Secara administratif Jawa Tengah terbagi menjadi 35 kabupaten/kota, atau terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, dengan kota Semarang sebagai ibukota Provinsi. Cilacap merupakan Kabupaten terluas yang ada di Jawa Tengah dengan luas 2.138,51 km², sedangkan Kota Magelang yang terkecil dengan luas 18,12 km².

Pengujian Model Regresi

Dalam pemilihan model pada penelitian ini memerlukan Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji LM. Hasil dari Uji *Chow* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 : Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	87.808690	(34,206)	0.0000
Cross-section Chi-square	671.390335	34	0.0000

Sumber: Output Eviews9, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *P Value* (Prob F) $<$ *Alpha* 0,05 atau signifikan pada tingkat 5% dengan nilai 0,0000. Dari hasil estimasi tersebut dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* lebih tepat untuk digunakan pada penelitian ini dibandingkan dengan model *Common Effect* pada Uji *Chow*. Langkah selanjutnya

dilakukan *Hausman Test* untuk mendapatkan kesimpulan model yang terbaik. Hasil uji hausman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 : Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.582845	4	0.3328

Sumber: Output Eviews9, 2021

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai prob. cross-section random $> 0,05$ yaitu sebesar 0,3328 sehingga kesimpulannya *Random Effect Model* yang dipilih. Dari beberapa pengujian model, maka diputuskan bahwa model yang digunakan dalam analisis regresi pada pengujian ketiga adalah *Common Effect Model*. Karena hasil Uji Chow dan Uji Hausman jatuh pada *Random Effect Model*, maka perlu dilakukan Uji LM (*Langrange Multiplier Test*). Yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 : Hasil Uji LM

	Test Hypothesis		
	Cross-sectio...	Time	Both
Breusch-Pagan	611.7565 (0.0000)	0.828180 (0.3628)	612.5846 (0.0000)

Sumber: Output Eviews9, 2021

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai prob. cross-section Breusch-Pagan $< 0,05$ yaitu sebesar 0,0000 sehingga kesimpulannya *Random Effect Model* yang dipilih. Dari beberapa pengujian model, maka diputuskan bahwa model yang digunakan dalam analisis regresi pada penelitian ini adalah *Random Effect Model*.

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil dari Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM dari ketiga pengujian model regresi yang telah dilakukan, akhirnya didapatkan hasil bahwa *Random Effect Model* merupakan model terbaik untuk regresi data panel pada penelitian ini. Berikut merupakan hasil dari pengolahan data panel *Random Effect Model* untuk pengujian tersebut:

Tabel 4 : Hasil Olahdata

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.85428	2.050178	15.53733	0.0000
X1_PDRB	-0.016656	0.048256	-0.345159	0.7303
X2_TPT	0.177673	0.069098	2.571309	0.0107
X3_RLS	-2.766814	0.232731	-11.88845	0.0000
X4_UMK	0.029648	0.012779	2.320090	0.0212

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		3.320912	0.9315
Idiosyncratic random		0.900278	0.0685

Weighted Statistics			
R-squared	0.529622	Mean dependent var	1.259253
Adjusted R-squared	0.521782	S.D. dependent var	1.303438
S.E. of regression	0.901371	Sum squared resid	194.9926
F-statistic	67.55694	Durbin-Watson stat	0.922025
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews9, 2021

Berdasarkan dari hasil regresi *Random Effect Model* diatas dapat disimpulkan hasil pengaruh variabel PDRB, tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan, serta upah minimum kabupaten/kota terhadap Kemiskinan Jawa Tengah sebagai berikut:

- Jika seluruh variabel independen dianggap memiliki nilai konstan atau memiliki nilai nol, maka besarnya nilai Kemiskinan Jawa Tengah adalah sebesar 31,85428.
- Nilai koefisien dari regresi laju pertumbuhan PDRB adalah sebesar -0,016656 yang berarti bahwa laju pertumbuhan PDRB dan Kemiskinan di Jawa Tengah memiliki hubungan negatif, sehingga apabila laju pertumbuhan PDRB mengalami kenaikan sebesar satu persen dengan menganggap faktor lain konstan atau tetap, maka Kemiskinan di Jawa Tengah akan mengalami penurunan sebesar 0,016656 persen.

- Nilai koefisien dari regresi tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 0,177673 yang berarti bahwa tingkat pengangguran terbuka dan Kemiskinan di Jawa Tengah memiliki hubungan positif, sehingga apabila tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar satu persen dengan menganggap faktor lain konstan atau tetap, maka Kemiskinan di Jawa Tengah akan mengalami kenaikan sebesar 0,17763 persen.
- Nilai koefisien dari regresi tingkat pendidikan adalah sebesar -2,766814 yang berarti bahwa tingkat pendidikan dan Kemiskinan di Jawa Tengah memiliki hubungan negatif, sehingga apabila tingkat pendidikan mengalami kenaikan sebesar satu persen dengan menganggap faktor lain konstan atau tetap, maka Kemiskinan di Jawa Tengah akan mengalami penurunan sebesar 2,766814 persen.
- Nilai koefisien dari regresi upah minimum kabupaten/kota adalah sebesar 0,029648 yang berarti bahwa upah minimum kabupaten/kota dan Kemiskinan di Jawa Tengah memiliki hubungan positif, sehingga apabila upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar satu persen dengan menganggap faktor lain konstan atau tetap, maka Kemiskinan di Jawa Tengah akan mengalami kenaikan sebesar 0,029648 persen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi R^2 digunakan untuk memberikan gambaran seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan sebelumnya dengan *Random Effect Model* pada tabel sebelumnya dapat dilihat bahwa nilai R^2 sebesar 0,529622 atau sebesar 52,96%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel PDRB, tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan, serta upah minimum kabupaten/kota terhadap Kemiskinan Jawa Tengah sebesar 52,96% sedangkan sisa dari nilai R^2 sebesar 0,4704 atau 47,04% dijelaskan melalui variabel lain diluar model penelitian.

Uji Simultan (Uji F-Statistik)

Uji Simultan atau Uji F-statistik digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara simultan atau bersama – sama pada variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil regresi *Random Effect Model* pada tabel sebelumnya, dapat dilihat bahwa nilai prob (F-statistic) adalah sebesar 0,0000. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa nilai prob (F-statistic) lebih kecil dari nilai *alpha* sebesar 0,05 atau 5%, artinya bahwa model ini signifikan pada taraf keyakinan sebesar 95%. Dengan hasil tersebut maka menunjukkan bahwa variabel PDRB, tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan, serta upah minimum kabupaten/kota secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan di Jawa Tengah.

Uji Parsial (Uji t-Statistik)

Uji parsial atau uji t-statistik digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara parsial atau pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat nilai probabilitasnya. Dalam penelitian ini

uji t-statistik digunakan untuk melihat pengaruh variabel PDRB, tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan, serta upah minimum kabupaten/kota terhadap Kemiskinan Jawa Tengah. Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan melalui *Random Effect Model* pada tabel diatas dapat dijelaskan uji t-statistik sebagai berikut:

- Dari hasil pengujian t-statistik menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada variabel laju pertumbuhan PDRB sebesar 0,7303. Nilai tersebut lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,05 atau dengan kata lain tidak signifikan pada tingkat 5%. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa laju pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
- Dari hasil pengujian t-statistik menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,0107. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 atau dengan kata lain signifikan pada tingkat 5%. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
- Dari hasil pengujian t-statistik menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada variabel tingkat pendidikan sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 atau dengan kata lain signifikan pada tingkat 5%. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
- Dari hasil pengujian t-statistik menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada variabel upah minimum kabupaten/kota sebesar 0,0212. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 atau dengan kata lain signifikan pada tingkat 5%. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB Terhadap Kemiskinan

Nilai koefisien dari regresi laju pertumbuhan PDRB adalah sebesar -0,016656 yang menyatakan apabila laju pertumbuhan PDRB mengalami kenaikan sebesar satu persen, maka Kemiskinan di Jawa Tengah akan mengalami penurunan sebesar 0,016656 persen. Sementara nilai probabilitas pada variabel laju pertumbuhan PDRB sebesar 0,7303. Nilai tersebut lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,05 atau dengan kata lain tidak signifikan pada tingkat 5%. Hal ini mengartikan bahwa laju pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh signifikan.

Hal ini dapat disebabkan oleh adanya ketimpangan pada wilayah Jawa Tengah, yang berarti hanya sebagian daerah yang menopang pertumbuhan pada wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Dita Ayu (2018:58) bahwa laju pertumbuhan PDRB dapat mengurangi kemiskinan di suatu wilayah, dikarenakan adanya dominasi dari kalangan berpendapatan tinggi yang menopang laju pertumbuhan PDRB di wilayah terkait. Tetapi hal

tersebut juga dapat menimbulkan ketimpangan apabila tidak diikuti dengan pemerataan pada wilayah terkait. Sama dengan yang diutarakan oleh Tambunan (2011:67) bahwa ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat mempengaruhi dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Nilai koefisien dari regresi tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 0,177673 yang menyatakan apabila tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan sebesar satu persen, maka Kemiskinan di Jawa Tengah akan mengalami peningkatan sebesar 0,177673 persen. Sementara nilai probabilitas pada variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,0107. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 atau dengan kata lain signifikan pada tingkat 5%. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Seperti yang diutarakan oleh Sukirno (2006:14) bahwa pengangguran akan menyebabkan dampak yang buruk pada perekonomian, dikarenakan seseorang yang tidak bekerja tidak dapat menghasilkan penghasilan yang nantinya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Semakin banyaknya pengangguran maka akan semakin banyak masyarakat yang tidak menghasilkan pendapat, yang akan mengakibatkan sebagian masyarakat tersebut tidak dapat untuk memenuhi kebutuhannya, yang nantinya akan menghambat jalannya aktivitas perekonomian dalam daerah tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mendapatkan hasil bahwa pengangguran memiliki korelasi positif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Dalam penelitiannya Hartanto (2017:7) mengatakan bahwa keberadaan pengangguran di Jawa Tengah diduga didominasi oleh masyarakat yang baru menyelesaikan pendidikan dan masih menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap, pun ada juga yang memilih untuk bekerja di sektor informal seperti pertanian, nelayan, dsb. Berdasarkan data, bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa tingkat pendidikan di Jawa Tengah juga merupakan yang terendah. Ini diduga dapat menjadi peran rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berada di Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Nilai koefisien dari regresi tingkat pendidikan adalah sebesar -2,766814 yang berarti apabila tingkat pendidikan mengalami kenaikan sebesar satu persen, maka Kemiskinan di Jawa Tengah akan mengalami penurunan sebesar 2,766814 persen. Sementara nilai probabilitas pada variabel tingkat pendidikan sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 yang dengan kata lain signifikan pada tingkat 5%. Hal ini mengartikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Pernyataan Todaro (2006:461) menjelaskan bahwa pendidikan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif karena pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas terkait dengan sekolah, terciptanya kelompok pemimpin yang

terdidik, dan tersedianya berbagai program pelatihan dan pendidikan. Hal ini terbukti adanya bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan dapat mengurangi kemiskinan. Setyo Rini dkk (2016:13) mengemukakan juga bahwa pendidikan orang tua memiliki pengaruh positif dalam partisipasi sekolah anak. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan dalam memecah rantai kemiskinan melalui perbaikan pada pendidikan anak.

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Kemiskinan

Milai koefisien dari regresi upah minimum kabupaten/kota adalah sebesar 0,029648 yang menyatakan apabila terjadi kenaikan upah minimum kabupaten/kota sebesar satu persen, maka akan menaikkan kemiskinan sebesar 0,029648 persen. Sementara untuk nilai probabilitasnya sebesar 0,0212 yang menyatakan lebih kecil dari nilai alpha 0,05 atau 5%. Hal ini mengartikan bahwa upah minimum kabupaten/kota memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kemiskinan.

Hal ini juga tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa dengan meningkatkan upah minimum kabupaten/kota maka akan dapat menanggulangi kemiskinan, terdapat faktor lain yang mempengaruhi tingkat upah yang walaupun terus meningkat tetapi masih belum mengurangi kemiskinan, seperti gaya hidup, pengeluaran masyarakat, cicilan, hutang dan inflasi yang tidak sepadan dengan upah yang diterima masyarakat (Khaqiqi, 2020:35). Selain hal tersebut, penulis menduga bahwa dikarenakan mayoritas penduduk Jawa Tengah yang masih banyak yang memilih bekerja pada sektor informal seperti pekerja bebas pertanian, pengusaha sendiri, pekerja bebas non-pertanian, dan sebagainya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat PDRB di Jawa Tengah yang masih didominasi oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan, dan upah minimum kabupaten/kota terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2013 – 2019, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tetapi tidak signifikan. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Karena kemajuan suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Apabila suatu daerah atau wilayah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Tetapi hal itu juga harus diikuti dengan ditingkatkannya pemerataan pendapatan pada tiap-tiap daerah agar tidak terjadi ketimpangan yang akan menjadikan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mampu dalam mengentaskan kemiskinan.
2. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan dan pengaruhnya positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Tengah diduga karena

masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh masyarakat Jawa Tengah, sehingga perlunya peningkatan dalam bidang pendidikan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membuka lapangan pekerjaan baru di daerah tersebut yang dapat meningkatkan pemerataan pendapatan antar daerah di Jawa Tengah.

3. Tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil ini membuktikan bahwa pentingnya pendidikan dalam membangun sumber daya manusia yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan dalam suatu wilayah ialah penting. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka akan banyak masyarakat yang mampu membuka lapangan pekerjaan dan juga dapat lebih memaksimalkan ataupun mengatur keuangan yang menghindarkan mereka dari kemiskinan.
4. Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten masih belum mampu *mengcover* kebutuhan sehari-hari masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, ada pula faktor lain yang diduga menghambat upah minimum kabupaten dalam meringankan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, di antara lain adalah gaya hidup masyarakat yang masih belum dapat mempergunakan uangnya dengan baik sehingga membawa mereka ke jalan kemiskinan. Serta mayoritas pekerjaan masyarakat yang masih bertumpu pada sektor informal, seperti pertanian, nelayan, usaha sendiri yang tidak memiliki tingkat penghasilan yang tetap.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka saran yang peneliti ajukan untuk direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam mengukur kemajuan suatu wilayah, tetapi hal tersebut bukan hanya ditopang oleh sebagian masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi, pemerataan pendapatan wilayah ini juga merupakan tolak ukur penting dalam melihat kemajuan suatu wilayah. Maka dari itu, perlunya optimalisasi dan peningkatan sektor usaha yang ada di Provinsi Jawa Tengah merupakan penting adanya, supaya dapat menekan angka kemiskinan di wilayah serta dapat meningkatkan pemerataan pendapatan yang lebih baik.
2. Pengangguran dapat memberikan efek yang buruk dalam perekonomian, Pemprov Jawa Tengah perlu untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berada pada Provinsi Jawa Tengah sehingga mereka bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta mendapatkan upah yang layak. Hal ini bisa diintensifkan melalui program-program pelatihan yang nantinya dapat meningkatkan kualitas manusianya sehingga dapat bersaing dan mampu menghindarkan diri dari garis kemiskinan.
3. Pendidikan sudah selayaknya dienyam oleh tiap-tiap individu. Dalam hal mengatasi kemiskinan, pendidikan memiliki peran penting yang sangat berpengaruh untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Perlunya pemerintah setempat untuk memprioritaskan pendidikan yang nantinya menentukan kualitas sumber daya

manusia pada wilayah tersebut. dengan kualitas sumber daya manusia yang bagus diharapkan mampu mengurangi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

4. Perlunya penyesuaian upah minimum kabupaten/kota yang menyesuaikan dengan pengeluaran kehidupan hidup layak (KHL) masyarakat dapat menjadi opsi untuk mengurangi kemiskinan. Diikuti dengan program-program bantuan kemiskinan serta bantuan dalam hal pelatihan untuk umkm serta pekerja-pekerja informal lainnya supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka.
5. Bagi pemerintah atau lembaga yang bertanggungjawab, diharapkan mampu menyediakan data-data secara komprehensif demi terciptanya analisa serta penelitian yang lebih mumpuni.
6. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan lebih banyak memilih variabel yang mempunyai pengaruh lebih besar dan signifikan. Saat ini variabel penelitian yang digunakan hanya terbatas pada variabel yang telah dibahas, hal ini dilakukan karena variabel lain yang ingin digunakan terkendala pada ketersediaan data secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, M., Muhidin, S. A., & Sumantri, A. (2011). *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*.
- Ardiansyah D P, M. (2019). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Dan Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 - 2017.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan : Vol. Kelima*. UPP STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Retrieved December 2, 2021, from www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Profil Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah*. Retrieved November 10, 2021, from <http://jateng.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka*. Retrieved November 10, 2021, from <http://jateng.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka*. Retrieved November 10, 2021, from <http://jateng.bps.go.id>
- Bintang, A. B. (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Periode 2011-2015.
- Boediono. (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Cahya P P, T. (2012). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, PDRB, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jember 2000-2012.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. J. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Penerbit Salemba Empat.
- Hartanto, T. B., & Maskuri, S. U. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur.
- Ika Purnama, N. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara.
- Jhingan, M. L. (2007). *Ekonomi Pembanguna dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Khaqiqi, M. N. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, dan Upah Terhadap Kemiskinan.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Jakarta Selatan: Erlangga.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2012). *Pembangunan Wilayah : Perpektif, Ekonomi, Social, dan Lingkungan* .
- Prayoga, M. L. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo.
- Rami Ben Haj, K. (2012). Monetary versus Non-Monetary Pro-Poor Growth : Evidence from Rural Ethiopia between 2004 and 2009. *Economics Discussion Papers*, 20-62.
- Ravallion, M. (2016). *The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy*.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Jakarta.
- Sekar Ayu, D. (2018). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur.
- Setyo Rini, A., & Sugiharti, L. (2016). Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan di Indonesia: Analisis Rumah Tangga.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan (Edisi Kedua)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, S. (2009). *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta.
- Tambunan, T. T. (2011). *Perekonomian Indonesia, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M., & Smith. (2015). *Economics Development*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (n.d.).
- Yusuf, M. (1999). Model Rasio Pertumbuhan sebagai Salah Satu Alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia Vol. XLVII No. 2*, 219-235.